BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa KPIPA dalam upaya advokasi isu kemanusiaan di Gaza pasca 7 Oktober 2023 telah mempraktikkan TAN dan *Boomerang Pattern*, yang melibatkan media, NGO, dan negara, meskipun hubungannya dengan aktor internasional masih terbatas. Hubungan yang dijaga KPIPA dengan ketiga aktor tersebut merupakan bukti bahwa mereka telah menerapkan *Boomerang Pattern* untuk memberikan tekanan yang dipantulkan kepada negara target, yaitu Israel agar menghentikan agresinya terhadap Gaza dan menaati hukum internasional yang berlaku. Sejalan pada teori TAN, KPIPA sebagai aktor dalam jaringan advokasi telah mengambil bagian dalam menciptakan agenda, menyebarkan gagasan, dan informasi dalam advokasinya untuk Gaza pasca 7 Oktober 2023 dalam aktivitasnya bersama mitra jaringan.

Kehadiran KPIPA dalam jaringan advokasi tersebut sangat dibutuhkan dalam mengisi kekosongan peran mengingat adanya ketimpangan media Barat dalam memberitakan isu mengenai konflik Israel dan Palestina pasca 7 Oktober 2023. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik, khususnya terhadap isu-isu krisis kemanusiaan. Namun, media Barat, seperti *The Guardian*, *The New York Times*, dan BBC, cenderung bias dalam memberitakan isu kemanusiaan di Gaza pasca 7 Oktober 2023. Media Barat tersebut menunjukkan keberpihakkannya pada Israel dengan penggunaan kata yang menggambarkan Hamas sebagai pihak yang agresif dan Israel sebagai korban atas peristiwa tersebut. Media Barat tersebut juga cenderung menggunakan informan dari pihak Israel, mulai dari tokoh politik hingga keluarga masyarakat sipil di Israel. Sementara itu, penderitaan masyarakat sipil Palestina, khususnya di Gaza kerap diabaikan dan ditampilkan secara terbatas. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa media Barat memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi publik global karena namanya yang besar

dan mendunia. Dalam hal ini, KPIPA sebagai aktor non-negara yang merupakan kelompok jaringan dari GWCQP di Indonesia mengambil bagian untuk menjadi perpanjangan tangan jaringan dan memfasilitasi aktor non-negara, serta negara dalam menyuarakan isu kemanusiaan di Gaza pasca 7 Oktober 2023.

Dalam hubungannya dengan media, KPIPA membangun hubungannya dengan cara menyebarkan rilis, hadir pada undangan perkumpulan media, dan mengundang atau mengadakan perkumpulan media pada acara-acara yang diselenggarakannya, sehingga terjalin komunikasi langsung dan tidak langsung. Media internasional besar seperti Al-Jazeera juga dilibatkan sebagai narasumber pada konferensi yang diselenggarakan di Bandung untuk menggaungkan narasi kemanusiaan untuk mendesak seluruh media agar konsisten dalam memberitakan isu kemanusiaan di Palestina yang mana hal ini juga merupakan bagian dari *Boomerang Pattern* untuk menekan Israel sebagai negara target. Dalam hubungannya dengan NGO, KPIPA membangun dan menjaga hubungan kolektif dengan NGO dari berbagai negara dalam jaringan GWCQP dan APWCQP. Hasil analisis menunjukkan bahwa KPIPA berperan aktif bersama NGO lintas negara lainnya dalam mengadvokasikan isu kemanusiaan di Gaza pasca 7 Oktober 2023, ditandai dengan aktivitas tahunan yang intens, mulai dari forum, konferensi, dan komunikasi yang dijaga dari jarak jauh melalui media elektronik secara rutin. Berdasarkan teori TAN, KPIPA memanfaatkan jaringan GWCQP dan APWCQP untuk bertukar informasi, menyelaraskan agenda, membangun narasi bersama, dan memperluas jangkauan advokasi ke tingkat global. Hal ini juga merupakan pola *Boomerang Pattern*, yaitu KPIPA dengan NGO lainnya saling berinteraksi secara transnasional untuk menciptakan tekanan yang lebih besar kepada Israel sebagai negara target. Dalam hubungannya dengan negara, KPIPA belum memiliki hubungan formal yang terikat dengan suatu negara, tetapi dalam aktivitasnya ditemukan dukungan simbolik dari negara Qatar dan Indonesia pada acara yang diselenggarakan KPIPA dan mitranya. Berdasarkan teori TAN, KPIPA dan jaringan transnasionalnya berhasil memanfaatkan hubungan non-formal dengan negara untuk memberikan pernyataan yang

mendukung narasi kemanusiaan KPIPA dan jaringan transnasionalnya, sehingga memberikan tekanan moral dan politik kepada Israel selaku negara target.

Penelitian ini belum menemukan adanya hubungan antara KPIPA dengan lembaga internasional dalam mengadvokasikan isu kemanusiaan di Gaza pasca 7 Oktober 2023. Namun, sebagai aktor non-negara yang baru berdiri 5 tahun dalam jaringan advokasi transnasional, KPIPA telah konsisten dalam mengadvokasikan isu kemanusiaan di Gaza baik sebelum maupun sesudah 7 Oktober 2023. Di samping keterbatasan tersebut, hubungan KPIPA dengan aktor lainnya, seperti media, NGO, dan negara yang dijaga dapat menjadi modal penting untuk memperluas pengaruh dan jaringan aktor internasionalnya dalam upaya advokasi di masa depan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis teori TAN pada KPIPA dalam upaya advokasi transnasional terhadap isu kemanusiaan di Gaza 2023—2025, berikut saran peneliti yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk peneliti dan pemangku kepentingan selanjutnya:

5.2.1. Saran Teoritis

Setelah mendalami informasi mengenai KPIPA dan *Global Women's Coalitions for Quds and Palestine*, peneliti menemukan banyak potensi yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya. Saat melakukan wawancara, peneliti mendapatkan jawaban dari narasumber bahwa GWCQP memiliki tim hukum. Akan tetapi, peneliti belum bisa mendapatkan jawaban terkait ke lembaga apa tuntutan advokasi kelompok jaringan GWCQP diteruskan. Hal ini karena informasi ini lebih tepat ditanyakan kepada pengurus GWCQP, sehingga pertanyaan penelitian tersebut tidak bisa ditanyakan kepada narasumber dari KPIPA. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut tentang advokasi *Global Women's Coalitions for Quds and Palestine* terhadap isu kemanusiaan di Gaza sejak Oktober 2023 yang berfokus untuk mendalami peran tim hukum GWCQP dalam mengadvokasi isu tersebut. Selain itu,

peneliti juga dapat mengkaji mengenai advokasi kemanusiaan di Gaza oleh kelompok jaringan GWCQP dan APWCQP dari negara lainnya, seperti Afrika atau Asia Pasifik, selain Indonesia. Terlebih lagi, saat ini Ketua KPIPA juga baru saja menjabat sebagai Ketua GWCQP, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah karena kesamaan bahasa.

Sementara itu, saran peneliti untuk topik selain advokasi adalah mengkaji aktivitas KPIPA atau NGO lainnya bersama GWCQP, seperti kontribusi kelompok jaringan GWCQP dalam menyediakan proyek-proyek bantuan yang mencakup klinik kesehatan dan ekonomi berkelanjutan untuk pemberdayaan perempuan di Palestina. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji upaya diplomasi kemanusiaan Adara Relief Internasional sebagai NGO bagian dari KPIPA yang memiliki legitimasi untuk mengirimkan bantuan langsung ke Gaza. Peneliti menyadari bahwa ada keterbatasan dalam perolehan informasi yang mungkin mempengaruhi kedalaman analisis. Meski demikian, peneliti berharap kajian-kajian serupa terkait peran NGO di Indonesia maupun jaringan transnasionalnya dapat terus dikembangkan dan diperbanyak sebagai upaya untuk tetap menyuarakan isu kemanusiaan di Gaza melalui dunia pendidikan. Peneliti berharap banyaknya kajian serupa dapat mengangkat nama kelompok jaringan yang menyuarakan isu kemanusiaan di Gaza untuk memperluas dukungan terhadap mereka di tingkat nasional maupun internasional.

5.2.2. Saran Praktis

1. Kepada Pemerintah Indonesia

Peneliti menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menguatkan hubungan dan berkolaborasi bersama KPIPA dalam upaya diplomasi formal terkait isu kemanusiaan di Gaza guna memperluas jaringan internasional KPIPA sebagai aktor mitra. Pemerintah dapat menggandeng KPIPA dalam forum-forum internasional yang resmi atau saat berdiplomasi ke negara-negara

untuk memperluas peluang KPIPA untuk menjalin kemitraan dengan aktor negara atau lembaga internasional lainnya, serta dapat meningkatkan legitimasi KPIPA sebagai aktor non-negara dalam memperjuangkan krisis isu kemanusiaan di Gaza.

2. Kepada KPIPA

Peneliti menyarankan kepada KPIPA untuk membangun hubungan dengan lembaga internasional dan aktor non-negara di luar jaringan GWCQP, serta memperbanyak kolaborasi khusus lintas negara dengan NGO anggota GWCQP, seperti dengan Malaysia atau negara lainnya, guna menguatkan jaringan advokasi transnasional dalam menekan Israel. Untuk meningkatkan legitimasi organisasi, KPIPA dapat melakukan pendekatan kepada UN Women, Human Right Watch, Amnesty Internasional, atau organisasi besar lainnya yang sudah diakui secara global untuk bekerja sama atau KPIPA dapat mendorong GWCQP untuk bekerja sama dengan organisasi internasional tersebut yang sudah biasa menyuarakan isu HAM global agar menciptakan tekanan yang lebih besar kepada Israel.

3. Kepada Media Nasional dan Internasional

Peneliti menyarankan kepada media nasional dan internasional untuk tetap menyuarakan isu kemanusiaan di Gaza secara adil untuk menguatkan dukungan masyarakat global dan mengimbangi bias media Barat, serta menjalin kemitraan dengan KPIPA dalam mendukung penyebaran narasi kemanusiaan untuk Gaza. Kolaborasi KPIPA dengan media dalam penyebaran berita bukan hanya membangun opini publik, tetapi juga meningkatkan rasa emosional kepada masyarakat dari narasi, gambar, dan video.

4. Kepada Akademisi

Peneliti menyarankan kepada akademisi untuk memperbanyak riset mengenai peran NGO domestik dalam solidaritas transnasional terkait isu kemanusiaan di Gaza, guna membantu mengangkat eksistensi NGO tersebut dan memperluas pengaruh mereka di tingkat nasional dan internasional. Selain riset, akademisi juga dapat memperbanyak

kajian tentang krisis kemanusiaan di Gaza sejak Oktober 2023 melalui seminar atau kuliah umum yang melibatkan aktor negara dan non-negara, seperti pemerintah dan KPIPA.

5. Kepada Pemangku Kepentingan Lainnya

Peneliti menyarankan kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti perusahaan lokal untuk dapat berkolaborasi dengan KPIPA melalui dukungan finansial, memfasilitasi ruang demokrasi di media, atau bentuk kontribusi lainnya untuk menunjang keberlanjutan operasional dan efektivitas advokasi mereka terhadap advokasi kemanusiaan untuk Gaza.

6. Kepada Masyarakat Umum

Peneliti menyarankan agar masyarakat di Indonesia terus vokal dalam menyuarakan isu kemanusiaan di Gaza, terutama sejak 7 Oktober 2023, untuk menyebarkan kesadaran kepada masyarakat lainnya dalam menguatkan advokasi. Masyarakat dapat aktif terlibat dalam kampanye dan webinar yang diselenggarakan NGO, misalnya KPIPA. Dukungan masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam advokasi internasional karena dapat melegitimasi gerakan advokasi dalam menekan negara target dan juga dapat memainkan peran dalam penyebaran informasi dengan media sosial, komunitas, dan platform pribadi lainnya. Masyarakat juga perlu terus memperluas informasi mengenai perkembangan kondisi yang terjadi di Gaza agar tidak mudah terpengaruh oleh bias media Barat.